

Determinan Partisipasi Sekolah Di Sumatera Barat

Shovi Amelta¹, Joan Marta²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: shoviamelta09@gmail.com, jomarta01@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

30 Oktober 2025

Disetujui:

1 November 2025

Terbit daring:

5 November 2025

DOI: -

Sitasi:

Amelta, S. & Marta, J. (2025).
Determinan Angka Partisipasi
Sekolah Di Sumatera Barat.

Abstract:

This study aims to examine the extent of the influence of the level of welfare, poverty rate, and educational facilities on school participation rates, covering 19 regencies/cities during the period 2017–2023. This study uses secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS). With school participation as the dependent variable, the level of welfare, poverty rate, and educational facilities are the independent variables. The research method used is panel data regression. The results of the study using the Fixed Effect approach show that the relationship, educational facilities have a significant effect on school participation, and the level of welfare and poverty rate have an insignificant relationship with school participation in the regencies/cities in West Sumatra in 2017–2023.

Keywords: School Participation, Level of Welfare, Poverty Rate, Educational Facilities

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Tingkat Kesejahteraan, tingkat kemiskinan, dan sarana pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah, yang mencakup 19 kabupaten/kota pada periode 2017-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan partisipasi sekolah sebagai variabel terikat, tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan, dan sarana pendidikan sebagai variabel bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian dengan pendekatan Fixed Effect menunjukkan bahwa hubungan, sarana pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah dan tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan mempunyai hubungan tidak signifikan terhadap partisipasi sekolah di kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2017-2023.

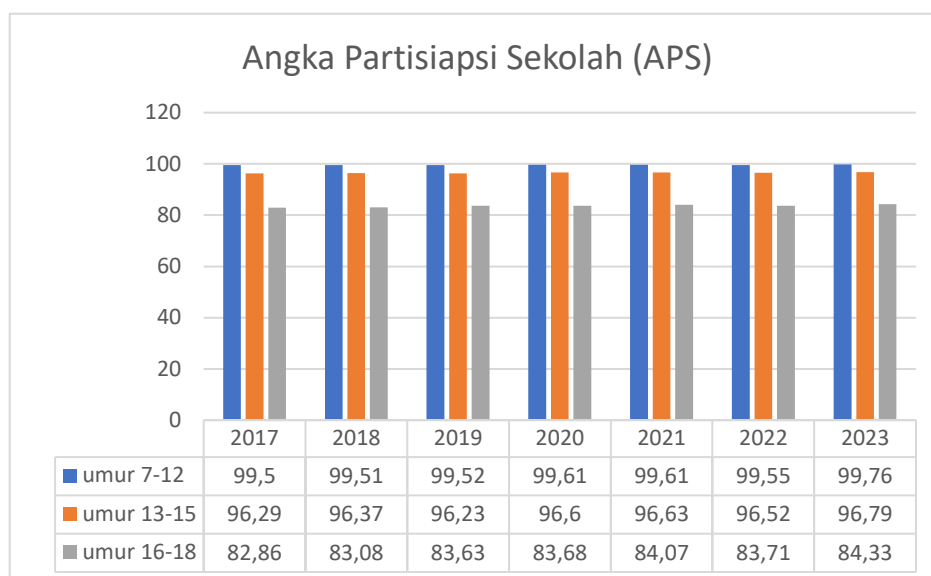
Kata Kunci: Partisipasi sekolah, Tingkat Kesejahteraan, Tingkat kemiskinan, dan Sarana Pendidikan

Kode Klasifikasi JEL: H53, H75, I32

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berperan langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan suatu daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

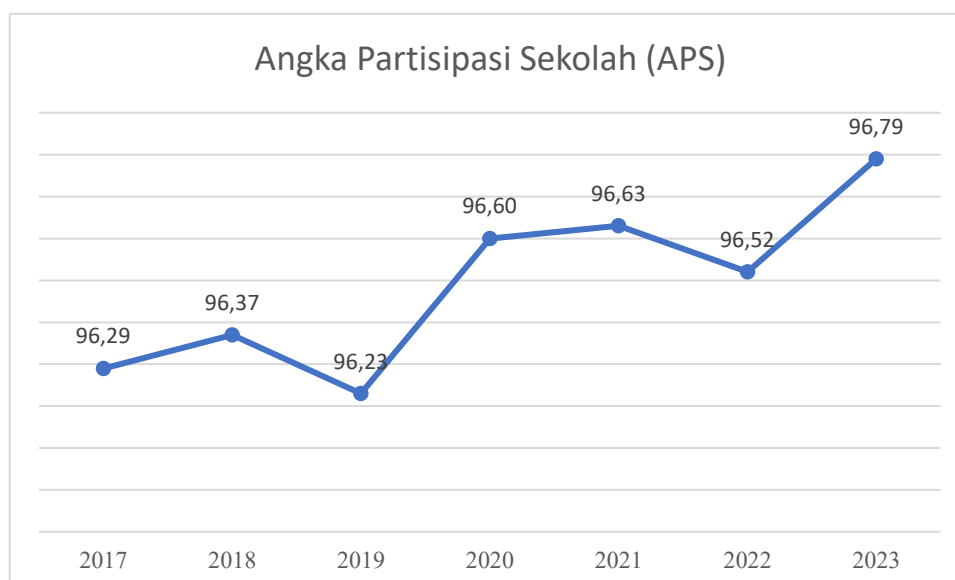
Salah satu indikator penting dalam mengukur akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), yaitu persentase anak usia sekolah yang sedang bersekolah dibandingkan dengan total anak pada kelompok umur tersebut. APS menjadi parameter utama dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di suatu wilayah.



Gambar 1 1. Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan umur (SD, SMP, dan SMA) di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

APS jenjang SD menunjukkan stabilitas tinggi di atas 99%, mencerminkan keberhasilan program wajib belajar 6 tahun. APS SMP relatif stabil namun mengalami fluktuasi ringan, mengindikasikan pengaruh faktor ekonomi dan distribusi fasilitas pendidikan. APS SMA menunjukkan tren peningkatan bertahap, namun tetap lebih rendah, menandakan tantangan dalam akses pendidikan lanjutan.

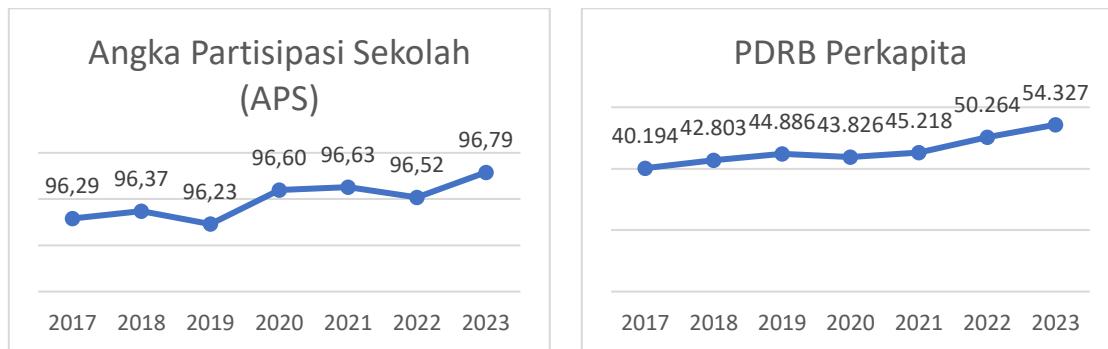


Gambar 1 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Gambar 1.2 menyajikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Sumatera Barat selama periode tujuh tahun, dari 2017 hingga 2023. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa APS berada pada kisaran tinggi, yaitu antara 96,23% hingga 96,79%. Meskipun fluktuasinya tergolong

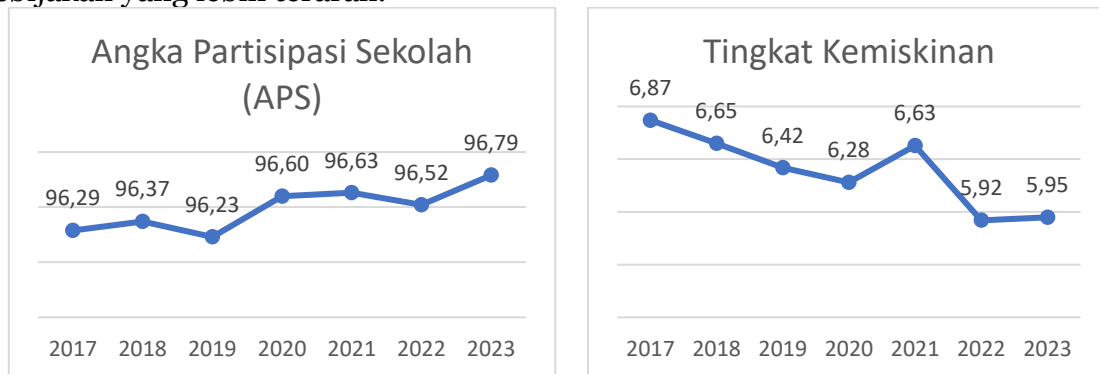
ringan, perubahan tahunan ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi akses pendidikan di tingkat menengah pertama.



Gambar 1 3. PDRB Perkapita Di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : (BPS, (diolah))

Penurunan tajam pada 2019–2020 kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Meskipun PDRB meningkat kembali, hubungan antara PDRB dan APS tidak selalu linier. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan akses pendidikan, sehingga perlu intervensi kebijakan yang lebih terarah.



Gambar 1 4 Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : (BPS, 2025)

Penurunan kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan APS. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti bantuan pendidikan, distribusi sekolah, dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam mendorong partisipasi pendidikan.



Gambar 1 5. Jumlah Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Jumlah sekolah mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada 2022. Penambahan sekolah di daerah minim fasilitas dapat meningkatkan APS, namun kualitas pengajaran dan distribusi geografis juga harus diperhatikan agar pembangunan sekolah benar-benar berdampak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Human Capital

Konsep modal manusia menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Becker (1964) menekankan bahwa pendidikan berperan dalam memperbesar produktivitas dan potensi pendapatan individu. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin besar peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan yang lebih tinggi. Dalam konteks partisipasi sekolah, teori ini menjelaskan bahwa peningkatan APS (Angka Partisipasi Sekolah) mencerminkan peningkatan investasi masyarakat terhadap pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Mankiw (2003) menambahkan bahwa modal manusia diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan kerja, yang keduanya berperan penting dalam proses produksi. Gaol (2014) memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa modal manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang menjadikan individu sebagai aset produktif dalam organisasi. Dengan demikian, partisipasi pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kesadaran masyarakat terhadap nilai pendidikan sebagai alat pembangunan.

Konsep Partisipasi Sekolah

Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengukur proporsi anak usia sekolah yang sedang mengikuti pendidikan formal dibandingkan dengan total populasi anak pada kelompok umur tersebut. Menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS), Partisipasi Sekolah

pada jenjang SMP mencakup anak usia 13–15 tahun. Semakin tinggi nilai APS, semakin besar cakupan layanan pendidikan yang berhasil dijangkau oleh sistem pendidikan.

Khan (2003) menyatakan bahwa partisipasi sekolah berkorelasi positif dengan status ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi partisipasi pendidikan, semakin besar potensi pendapatan keluarga. Schultz (1961) juga menekankan bahwa pendidikan tinggi menghasilkan individu yang lebih produktif, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

APS berbeda dari APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APK mengukur jumlah siswa di suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan populasi usia sekolah, sedangkan APM menunjukkan proporsi siswa yang bersekolah sesuai dengan kelompok umur resmi. Ketiga indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang akses dan efektivitas sistem pendidikan.

Faktor-Faktor Penentu Partisipasi Sekolah

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa APS dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan struktural. Suryadarma dan Suryahadi (2009) menemukan bahwa pembangunan sekolah dan kesejahteraan keluarga memiliki dampak positif terhadap partisipasi pendidikan. Sebaliknya, Listianawati (2012) menyimpulkan bahwa kemiskinan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap APS. Penelitian oleh Khairunnisa et al. (2015) menyoroti pentingnya fasilitas pendidikan dalam meningkatkan keterlibatan siswa.

Dalam konteks Sumatera Barat, tiga variabel utama yang dianalisis adalah PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah. PDRB per kapita mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membiayai pendidikan, sementara tingkat kemiskinan sering menjadi penghalang utama bagi akses pendidikan. Jumlah sekolah berperan dalam menentukan ketersediaan fasilitas pendidikan dan akses fisik siswa terhadap sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi kausal-komparatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi angka partisipasi sekolah (APS) di Provinsi Sumatera Barat. Fokus utama penelitian adalah menganalisis hubungan antara variabel ekonomi dan pendidikan terhadap APS pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama periode 2017–2023.

Variabel	Simbol	Nama Variabel	Keterangan
Dependen	Y	Partisipasi sekolah	Persentase anak usia 13–15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP dibandingkan dengan total anak usia tersebut di suatu wilayah. (Persen)
Independen	X1	Tingkat Kesejahteraan	Nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam satu tahun. (Ribu Rupiah)
	X2	Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. (Persen)
	X3	Sarana Pendidikan	Total unit sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta,

			yang aktif dan terdaftar di suatu kabupaten/kota. (Unit).
--	--	--	---

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} \quad (1)$$

Y_{it} : Partisipasi Sekolah (APS) % X_{1it} : Tingkat Kesejahteraan X_{2it} : Tingkat Kemiskinan (%)
 X_3 : Sarana Pendidikan (unit) i, t : untuk kabupaten-i tahun ke-t $\ln$: logaritma natural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menjelaskan secara deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel angka partisipasi sekolah yang terjadi rata-ratanya adalah sebesar 96.77361 dengan standar deviasi 1.833586 nilai maksimum 99.73000 dan nilai minimum 89.70000. Variabel PDRB perkapita yang terjadi rata-ratanya adalah sebesar 47631.28 dengan standar deviasi 13827.56, nilai maksimum sebesar 89737.00 dan nilai minimum sebesar 26394.00. Variabel tingkat kemiskinan yang terjadi rata-ratanya adalah sebesar 6.337669 dengan standar deviasi 2.463384, nilai maksimum sebesar 14.84000, dan nilai minimum sebesar 2.010000, dan variabel jumlah sekolah yang terjadi rata-ratanya adalah sebesar 43.78195 dengan standar deviasi 25.74359, nilai maksimum sebesar 100.0000 dan nilai minimum sebesar 7.000000.

Tabel 2. Pemilihan Model Terbaik

Uji Panel	Probabilitas	Keimpulan	
Chow Test	0.0000	Tolak H_0	FEM
Hausman Multiplier	0.0069	Tolak H_0	FEM

Sumber: Hasil Olah Data Eviews, 2025

Berdasarkan uji pemilihan model pada tabel 2, menunjukkan bahwa FEM lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Berikut disajikan hasil estimasi *Fixed Effect Model*.

Tabel 3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	93.51808	11.45736	8.162274	0.0000
LOG(TK_KSJTH)	-0.204455	1.107208	-0.184658	0.8538
TK_MSK	-0.268183	0.227442	-1.179127	0.2409
SRN_PDDKN	0.163290	0.061880	2.638823	0.0095

Sumber: Hasil Olah Data Eviews, 2025)

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan PDRB perkapita dan tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Secara simultan, PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah, terhadap angka partisipasi sekolah berpengaruh signifikan yang mampu menjelaskan variabel prevalensi stunting sebesar (R-squared = 0.796343).

Pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap partisipasi sekolah di sumatera barat

Tingkat kesejahteraan secara teoritis mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Dalam kerangka teori Human Capital (Mankiw, 2003; Maulidah, 2021), peningkatan pendapatan seharusnya mendorong investasi dalam pendidikan karena pendidikan dianggap sebagai modal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di masa depan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah (APS) di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan partisipasi pendidikan.

Data menunjukkan bahwa fluktuasi PDRB tidak selalu sejalan dengan perubahan APS. Misalnya, pada tahun 2022, PDRB per kapita mengalami kenaikan, tetapi APS justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak serta-merta meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. PDRB sebagai indikator makro tidak mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga secara langsung, sehingga masyarakat miskin tetap menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan meskipun PDRB meningkat.

Selain itu, sumber pertumbuhan PDRB juga memengaruhi dampaknya terhadap pendidikan. Jika PDRB meningkat karena sektor-sektor seperti pertambangan atau industri besar yang tidak menyerap tenaga kerja lokal atau tidak meningkatkan pendapatan rumah tangga, maka dampaknya terhadap APS menjadi lemah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Listianawati & Pascasarjana (2012), yang menyatakan bahwa kemakmuran ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan partisipasi pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan PDRB perlu diiringi dengan kebijakan distribusi pendapatan dan alokasi anggaran pendidikan yang lebih merata agar berdampak nyata pada APS.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap partisipasi sekolah di sumatera barat

Kemiskinan secara umum dianggap sebagai penghambat utama akses pendidikan. Dalam teori Human Capital, kemiskinan menghambat akumulasi modal manusia karena keterbatasan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh rumah tangga. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan, baik dari segi biaya langsung seperti uang sekolah maupun biaya tidak langsung seperti transportasi dan perlengkapan belajar. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap APS di Sumatera Barat.

Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan oleh efektivitas intervensi sosial dan kebijakan afirmatif yang dijalankan oleh pemerintah. Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa daerah, serta pembangunan sekolah di daerah tertinggal telah memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah. Data menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi, APS tetap relatif stabil atau bahkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tepat sasaran mampu memutus hubungan langsung antara kemiskinan dan rendahnya partisipasi pendidikan.

Pengaruh sarana pendidikan terhadap partisipasi sekolah di sumatera barat

Sarana pendidikan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap APS. Temuan ini sangat konsisten dengan teori Human Capital yang menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas pendidikan dalam pembentukan modal manusia (Gaol, 2014; Dahlan, 2014). Semakin banyak sekolah yang tersedia, semakin besar peluang anak-anak untuk mengakses pendidikan formal. Penambahan jumlah sekolah secara langsung meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya minim fasilitas.

Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sekolah pada tahun 2023 diikuti oleh peningkatan APS, yang memperkuat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Dengan semakin banyaknya sekolah, jarak tempuh siswa ke sekolah menjadi lebih

pendek, biaya transportasi berkurang, dan kenyamanan belajar meningkat. Selain itu, peningkatan jumlah sekolah juga berkontribusi terhadap penurunan kepadatan siswa per kelas dan peningkatan rasio guru terhadap murid, yang pada akhirnya mendorong peningkatan partisipasi sekolah.

Penelitian Suryadarma & Suryahadi (2009) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa pembangunan sekolah secara merata dapat meningkatkan partisipasi pendidikan. Purwanto (2010) juga menekankan bahwa rasio murid terhadap guru dan sekolah memengaruhi partisipasi secara signifikan. Oleh karena itu, jumlah sekolah menjadi faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan APS di Sumatera Barat selama periode penelitian. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan jumlah sekolah harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengajaran dan pemerataan distribusi sekolah agar dampaknya terhadap APS benar-benar optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect, penelitian ini menyimpulkan bahwa sarana pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang SMP di Sumatera Barat selama periode 2017–2023. Peningkatan sarana pendidikan di suatu wilayah terbukti mampu memperluas akses pendidikan dan mendorong lebih banyak anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal. Temuan ini menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai strategi utama dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di tingkat daerah.

Sebaliknya, variabel tingkat kesejahteraan dan tingkat kemiskinan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan partisipasi sekolah, kemungkinan karena distribusi manfaat ekonomi yang belum merata atau kurangnya intervensi kebijakan yang terarah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembangunan ekonomi dan kebijakan pendidikan yang inklusif, seperti penyediaan beasiswa, subsidi pendidikan, serta pembangunan sekolah di daerah tertinggal, guna memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhierianto, R., & Gunanto, E.Y. (2014). *Analisis Pengaruh Dau, Dak Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sd Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2003-2008*.
- Aminah, S. (2016). *Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Pada Masyarakat Pesisir Dan Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2015*.
- Aprilia, O., & Cerya, E. (2023). *Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Kabupaten Di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Salingka Nagari*.
- BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah)*. 1–23.

- BPS. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*. 2023.
- Dahiri, D. (2023). *Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Dan Angka Partisipasi Murni*. *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara*.
- DeviDaniati, B. (2014). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kalimantan Barat*.
- Dewi, S.A., & Jasmina, T. (2023). *Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Fatah, K., Tridevayanti, A., & Imtikhanah, S. (2023). *Pengaruh Belanja Pendidikan, Jumlah Guru, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah*. *Neraca*.
- Hanifah, M., Muhammad Arif, S.M., & Harun, M. (2019). *Analisis Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Dan Penghimpunan Dana ZIS Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2012-2016*.
- Hasyim, M. N. A., Puspitasari, F., & Veriyanto, A. (2022). *Determinan Partisipasi Sekolah Pada Pekerja Anak Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 2(2), 18–25. <https://ojs-ejak.id/index.php/>
- Hidayat, F. (2024). *Pengaruh Kemiskinan, Gini Ratio, dan Angka Partisipasi Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2011 2020*. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*.
- Inovasi, P., Angka, A., Kasar, P., Murni, A. P., Angka, T., & Sekolah, P. (2024). *Jurnal*. 4, 18–36. <https://doi.org/10.46229/elia.V4i1>
- Kuangan, M. D. A. N., Partisipasi, A., Aps, S., & Kota, D. (2017). *Jurnal pendidikan ekonomi manajemen dan keuangan*. 01(02).
- Khairunnisa, K., Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2014). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java Pendahuluan*. 15(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.05>
- Khairunnisa, K., Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2015). *Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.444>
- Khalis, N., & Amri, K. (2024). *Pengaruh PDRB Per Kapita dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Partisipasi Sekolah di Provinsi Riau*. 3(1), 26–36.
- Lestari, N.A., & Artidiatun Adji, M.M. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Serta Angka Putussekolah Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama: Data Panel 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2006 Hingga 2011*.
- Lidya, R. M. M., M.V, K. G., & Steeva, T. Y. . (2023). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan PDRB Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Mimika*. 23(7), 133–144.
- Maharani, K. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketercapaian Angka Partisipasi Sekolah Di Papua(Studi Kasus Di Kabupaten Merauke)*.
- Maiti, & Bidinger. (1981). *Pengaruh Citra Tubuh Terhadap Penyesuaian Diri Masa Pubertas Siswa-Siswa SMP NU Syamsuddin Kelas VII-VIII*. *Journal of Chemical Information and*

- Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Maulidah, F. F. (2021). *Pengertian Human Capital. FMSDM (Pengembangan SDM Era Digital)*, Sangkala 2006, 7–14.
- Nazarpour, A., Rostami Paydar, G., Mehregan, F., Hejazi, S. J., & Jafari, M. A. (2022). *Application of geographically weighted regression (GWR) and singularity analysis to identify stream sediment geochemical anomalies, case study, Takab Area, NW Iran. Journal of Geochemical Exploration*, 235(1), 103–115. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.106953>
- Nisa, A.K. (2017). *Pengaruh Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah Terhadap Kemiskinan Di 5 Negara Asean Pada Tahun 2010-2014*.
- Nurhanifa, N., & Pujiastuti, H. (2020). *Prediksi Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Banten dengan Menggunakan Interpolasi Lagrange. Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 17(1), 72. <https://doi.org/10.31851/sainmatika.v17i1.3822>
- Pangandaran, P. K. (2020). *Kata kunci : 2(9)*, 662–675.
- Prastiwi, Y. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Tingkat SMP/MTs Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Dan 2011*.
- Pratiwi, I., Sinaga, A.S., & Setiawati, S. (2025). *Analisis Pengaruh PDRB Perkapita dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan. Pentagon : Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*.
- Pratama, A.N. (2014). *Analisis pengaruh pdrb perkapita, jumlah penduduk, angka partisipasi sekolah, dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah (tahun 1993-2012)*.
- Putri, & Muslim, I. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia. Jurnal Economic Development*, 02(01), 8–9.
- Pulungan, L., Suib, M., & Syukri, M. (2014). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Bidang Pendidikan Pada Sds Ulumuddin Kabupaten Kubu Raya*.
- Puspitasari, P. (2022). *Analisis Pengaruh Pdrb Perkapita Dan Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah Periode Tahun 2015 & 2016. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Raya, P. (2018). *Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap PDRB Perkapita Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015*. 4.
- Reba, F., & Sroyer, A.M. (2020). *Prediksi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SMP/SMA dan Sederajat Tahun 2022–2030 Menggunakan Moving Average Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*.
- Ridwan, K. (2019). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016*.
- Safira, N., & Wibowo, Y.H. (2021). *Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan Indonesia. PAKAR Pendidikan*.
- Shari, R.M., & Abubakar, J. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Angka Partisipasi Sekolah Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Pada 5 Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Regional Unimal.

- Siddique, A. A. (2022). *Determinan Kemiskinan di Provinsi Riau. Jurnal Ekobistek*, 221–225. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.363>
- Soedibyo. (2003). *Determinan angka partisipasi sekolah smp. Teknik Bendungan*, 1–7.
- Suryana, Y., & Septian Pradana, R. (2023). *Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, Sma Dan Smp Menurut Provinsi Dan Menurut Gender Serta Hubungannya Dengan Kewidyaiswaraan.*
- Susyanthi, R. (2017). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Danpdrrb Per Kapita Terhadap Angka Partisipasi Kasar Padajenjang Sekolah Menengah Atas (Kabupaten Lampung Timur.*
- Toyamah, N., & Usman, S. (2015). *Education Budget Allocation in the Era of Regional Autonomy: Its Implications on Basic Education Service Management. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1–68.
- Yudita, A. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengimplementasikan Program Sejuta Biopori Di Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung.*
- Zahra, N. (2019). *Pengaruh Kemiskinan Dan Anggaran Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Indonesia.*